

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000;
- Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, 2008;
- Ali Achmad Chomzah, , *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002
Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012;
- Aristoteles, *Politik (La Politica)* Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008;
- AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni, 1986;
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja grafindo Persada, 2003
Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, edisi Revisi*, Alumni Bandung, Bandung, 1997;
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2005;
- Effendy Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994;
- G. Kartasapoetra, dkk., *Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991;
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Maju mundur , Bandung, 2009;
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I., Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995;
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006;
- Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung, Binacipta 1981;
- Kusnardi Muh. dan Bintang R Saragih ; *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1983;

Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995;

Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1970;

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada., 2006;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Geometri*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1990;

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983;

-----, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1987;

-----, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1980;

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993;

-----, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1987;

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Bandung, Ramadja Karya, 1988;

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta., 2000;

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty 1999;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, 1982,

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, , 2006;

Sholichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2008;

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung Alumni, 1973,
Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Gramedia Widiarsana Indonesia, 2009;

Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2008;

William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Hak Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

C. Website:

Website <http://fh.unram.ac.id/wpcontent/uploads/2014/07/tinjauan-yuridis-bukti-hak-atastanah-selain-sertipikat-girikberdasarkan-pp.nomor-24-tahun-1997.pdf>;

<http://www.merauke.go.id/portal/news/view/7/geografis.html>;

http://www.kompasiana.com/tiyowidodo/istilahistilahdalampenelitianilmiah_5500a547a33311be05b50fffa;

<http://asriman.com/sekelumit-mengenaisertifikat-imb-dan-sppt-pbb/>.